

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu kota tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat berbagai macam sebab yang mendorong adanya pertumbuhan penduduk secara umum, diantaranya adalah akibat dari tingginya angka perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sering disebut sebagai arus urbanisasi. Urbanisasi merupakan salah satu dari banyak sebab meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan dapat meningkatkan aspek pertumbuhan ekonomi pada suatu kota. Peningkatan jumlah penduduk atau pendatang tentu akan mendorong peningkatan terhadap jumlah kebutuhan ruang untuk bermukim yakni perumahan dan permukiman. Sebagai besar wilayah kota - kota besar di Indonesia ditempati oleh permukiman tidak terencana yang salah satunya dinamakan kampung.

Kampung kota secara umum diketahui sebagai suatu permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota. Kampung kota merupakan sebuah sistem permukiman pedesaan, mewakili suatu budaya bermukim, memberi corak dan aktifitas khas perkotaan tersendiri yang berkaitan dengan konsep *survival* (memperhatikan diri) terhadap kultur modren perkotaan disekitarnya (Budiharjo, 1997).

Sektor perumahan dan permukiman adalah hal penting dalam sebuah pembangunan atau perkembangan suatu kota yang berkaitan dengan akibat dari adanya urbanisasi. Selain perkembangan meningkatkan dalam sebuah aspek

ekonomi. Disisi lain urbanisasi juga berhubungan dengan degradasi lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan primer) yang harus terpenuhi agar manusia dapat sejahtera dan hidup layak sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Permukiman sebenarnya merupakan kebutuhan perorangan (individu) namun dapat berkembang menjadi kebutuhan bersama jika manusia berkeluarga dan bermasyarakat. Selain sebagai makhluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial maka manusia tidak hidup sendiri akan tetapi hidup bersama dan membentuk kelompok-kelompok. Demikian pula halnya dengan rumah tempat tinggalnya akan dibangun secara bersama-sama sehingga berkelompok atau tersebar dalam suatu wilayah, dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang diperlukan penghuninya, selanjutnya disebut dengan permukiman (*settlement*).

Perkembangan permukiman sangat dipengaruhi oleh penghuni permukiman itu sendiri. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan mengakibatkan kebutuhan permukiman semakin besar. Masalah ini hampir terjadi disetiap daerah perkotaan, karena kota merupakan daerah yang sangat dinamis yaitu pertumbuhan penduduknya setiap hari semakin bertambah banyak, begitu pula didaerah pedesaan baik sekitar kota maupun jauh dari kota.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak teratur tata letak bangunan, tingkat kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011).

Suatu permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai kondisi dari kemiskinan, karena pada umumnya dipermukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai dikawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin dan pengembangan institusi penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman pada umumnya.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat dikawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standard yang berlaku, baik standard kebutuhan. Kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas lainnya (Kurniasih, 2007)

Lingkungan permukiman bukan hanya terbentuk dari hasil kekuatan fisik tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sosial dan budaya yang didalamnya. {Rapoport, 1969} mengemukakan karakteristik lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terbentuknya tata ruang suatu permukiman dan arsitektur permukiman, selain faktor perilaku manusianya. Kawasan permukiman juga akan memiliki keunikan tersendiri yang terbentuk karena adanya kekhasan budaya masyarakat, kondisi iklim yang berbeda, karakteristik tapak, pengaruh

nilai-nilai spritualnya yang dianut, dan kondisi politik atau keamanan dari suatu daerah atau permukiman.

Ciri yang menonjol pada permukiman kumuh adalah kerapatan bangunannya yang tinggi, diindikasi oleh jarak antar bangunan yang relatif dekat (bersebelahan dan berhadapan) namun konstruksi bangunan umumnya permanen. Dampak dari kerapatan bangunan yang tinggi adalah kondisi ventilasi menjadi buruk akibat kurangnya sirkulasi udara. Drainase menjadi sempit dan dangkal karena lahan terbatas, akibatnya pada musin hujan permukiman tersebut sangat potensi mengalami banjir. Tata letak yang tidak teratur dan jalan sempit menyebabkan sirkulasi pergerakan tidak terarah, begitu pula dengan sanitasi lingkungan (sampah dan air limbah) menjadi tidak baik (Suparlan, 1984).

Permukiman kumuh dapat mengakibatkan berbagai dampak. Dari segi pemerintahan, pemerintah dianggap dan dipandang tidak peduli dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat. Sementara pada dampak sosial, dimana sebagian masyarakat kumuh adalah berpenghasilan rendah dan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dianggap sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Penduduk di permukiman kumuh tersebut memiliki persamaan, terutama dari segi latar belakang sosial ekonomi, pendidikan yang rendah, keahlian terbatas dan kemampuan adaptasi lingkungan yang kurang memadai. Kondisi kualitas kehidupan yang serba marjinal ini ternyata mengakibatkan semakin banyaknya penyimpangan perilaku penduduk penghuninya. Terjadi perilaku menyimpang ini karena sulitnya mencari atau menciptakan pekerjaan sendiri dengan keahlian dan kemampuan yang terbatas.

Sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Melly G. Tan mengemukakan Kedudukan sosial ekonomi seseorang dapat dilihat berdasarkan pekerjaan, penghasilan dan pendidikan sehingga masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan rendah, sedang, dan tinggi. Oleh karena itu faktor sosial ekonomi ini menjadi salah satu faktor penentu baik buruknya kualitas permukiman di suatu daerah. Dimana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi penentuan keputusan perihal pendirian suatu tempat bermukim serta pemeliharannya. (Koentjaraningrat, 1981: 35).

Kondisi sosial ekonomi meliputi kemampuan sosial masyarakat dipermukiman dalam memenuhi kebutuhan dalam membina keluarga dan membangun permukiman yang layak dan standar. Kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan permukiman masyarakat dilatar belakangi status sosial keluarga. Status sosial ekonomi yaitu kedudukan tertentu seseorang terhadap masyarakat lainnya dalam suatu kelompok atau kelas masyarakat. Syarat menjadi anggota kelas masyarakat ialah menjalankan beberapa aktivitas ekonomi, bentuk dan jumlah pendidikan resmi, jumlah penghasilan, dan lain-lain. Status sosial keluarga yang rendah menyebabkan ketidakmampuan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang sesuai dengan standar kebutuhan tempat tinggal

Perkembangan perumahan dan lingkungan permukiman baik diperkotaan maupun dipedesaan pada dasarnya harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti: penduduk, keadaan ekonomi, sosial budaya, masyarakat, pertahanan, kesempatan kerja, potensi daerah dan lingkungan hidup. Dengan lingkup kegiatan meliputi pengadaan air bersih, perumahan sederhana, perbaikan kampung,

pemugaran perumahan, penataan bangunan umum, penataan ruang, serta kegiatan penyuluhan dan pengembangan.

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan sarana dan prasarana belum memadai aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah, seperti listrik, transportasi, telekomunikasi, irigasi serta perumahan dan permukiman. Kebutuhan sarana dan prasarana sebuah daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia saat ini. Semakin sedikit jumlah sarana prasarana dan semakin banyak penduduk yang harus dilayani, maka sarana prasarana yang ada semakin tidak efektif untuk melayani kebutuhan penduduk. Salah satu upaya peningkatan pelayanan bagi penduduk adalah penambahan sarana prasarana.

Sementara pemenuhan sarana dan prasarana pada suatu lingkungan permukiman seharusnya dapat memenuhi kriteria perencanaan yang meliputi: Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Sarana Perinadatan, Pelayanan Umum dan *Open space* (ruang terbuka), Prasarana Jalan (baik lokal atau lingkungan), Saluran Air Bersih, Drainase, Tempat Pembuangan Sampah, serta Jaringan Listrik dan Jaringan Telepon. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman padat di kawasan pusat kota adalah melalui optimalisasi fungsi sarana dan prasarana lingkungannya yang akan berdampak pada aspek ekonomi, dimana semakin dekat suatu kelompok masyarakat penghuni terhadap sarana dan prasarana (*Infra Structure*) maka semakin sering mereka mendatangi sarana dan prasarana tersebut (Roestam, 1992)

Kota Belawan merupakan pintu gerbang Kota Medan dari jalur transportasi Laut. Status Pelabuhan Belawan merupakan pelabuhan internasional dengan intensitas yang sangat tinggi. Kawasan ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan kawasan strategis nasional. Namun dibalik tingkat perkembangan ekonomi kawasan yang sangat tinggi, terdapat permasalahan kemiskinan yang juga tertinggi dibandingkan dengan Kota Medan lainnya.

Status Pelabuhan Belawan merupakan pelabuhan internasional dan menjadi salah satu kawasan strategis nasional nampaknya tidak sejalan dengan kondisi perekonomian warganya terutama di kawasan Kelurahan Bagan Deli, yang mayoritas berata pencaharian sebagai nelayan/penangkap kerang. Disamping itu telah terjadi pencemaran pantai yang bersumber dari limbah industri/pabrik di hulu dan sampah rumah tangga. Sampah masih merupakan masalah karena telah mencemari air laut dan lokasi tempat tinggal masyarakat.

Akibat masalah pencemaran ini, di kawasan Bagan deli juga dijumpai banyak masalah yang berhubungan dengan adanya bangunan kumuh. Rumah-rumah penduduk dibangun dengan permanen dan semi permanen yang relatif kecil dan terbuat dari papan dan tepas dibangun dengan seadanya diatas paluh. Jika air laut surut daratannya terlihat sangat kotor karena sampah dan kotoran masyarakat yang berserakan sehingga kesehatan yang ada dilingkungan tersebut menjadi kumuh. Sangat banyak masalah kesehatan yang ada dipermukiman kumuh, diantaranya penyakit ISPA, penyakit kulit, serta rendahnya pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup masalah gizi yang belum lengkap.

Kelurahan Bagan Deli adalah 1 (satu) diantara 6 (enam) Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Belawan dengan luas wilayah 230 Ha. Kelurahan Bagan

Deli berbatasan langsung dengan Kelurahan Belawan I disebelah utara, Muara Sungai Deli disebelah Selatan, Selat Malaka disebelah Timur, Kelurahan Belawan II/Bahari disebelah Barat.

Berdasarkan uraian diatas, pada penyusunan tugas akhir ini, penulis mengambil judul “**Analisis Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan**”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kondisi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.
2. Rendahnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di permukiman Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan permukiman Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka permasalahan yang akan dikaji dan diteliti adalah karakteristik permukiman kumuh, kondisi ekonomi dan sosial, beserta sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Bagan Deli. Kecamatan Medan Belawan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai referensi bagi siapa yang tertarik dengan masalah karakteristik lingkungan permukiman kumuh.

Sebagai informasi bagi masyarakat tentang karakteristik lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.

